

**ANALISIS FAKTOR DETERMINAN PENGUNGKAPAN  
MODAL INTELEKTUAL  
(Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2017)**

**Yudha Eka Febrian**

*Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa*  
E mail: yudhafebrian74@yahoo.com

**Helmi Yazid**

*Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa*  
E mail: h.yazid@yahoo.com

**Iis Ismawati**

*Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa*  
Email: i.ismawati@yahoo.com

***Abstract***

*This research aims to determine the effect of the corporate governance mechanism on the disclosure of pharmaceutical companies' intellectual capital. The research population is pharmaceutical companies listed on the Stock Exchange for the period 2011-2017. The research sample consisted of 11 pharmaceutical companies with 7 years of observation. Sample data are 77 financial report data. The research method uses quantitative methods. The research design consisted of descriptive design and causal design. The results of testing the hypothesis, it is known that the size of the audit committee, the independence of the audit committee, the number of audit committee financial experts, the size of the board of commissioners and the independence of the board of commissioners have a positive effect on disclosure of intellectual capital. Audit committee meetings have no effect on disclosure of intellectual capital.*

***Keywords: Intellectual capital disclosure, corporate governance***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi serta ketatnya persaingan bisnis menyebabkan perusahaan merubah pola bisnis yang dilakukan dari yang semula menjalankan bisnis berbasis tenaga kerja (*labor intensive business*) menuju bisnis berbasis pengetahuan (*knowledge intensive business*). Sawarjuwono & Kadir (2003) menyatakan dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aset fisik lainnya memiliki peranan yang sama pentingnya dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Belkaoui (2003) menyatakan aset perusahaan, baik aset yang berwujud maupun aset tidak berwujud merupakan aset strategis yang sangat potensial bagi perusahaan. Aset intelektual dikategorikan sebagai aset strategis karena adanya hubungan erat antara modal intelektual dengan kinerja keuangan perusahaan. Alasan utama modal intelektual dianggap sebagai aset strategis dalam konteks kinerja organisasi, yaitu adanya perubahan tipe masyarakat dari masyarakat industrialis menuju masyarakat pengetahuan.

Kemunculan aliran baru dalam analisis keunggulan bersaing yang dikenal dengan pendekatan berbasis sumber daya (*Resource Based View of the Firm*), dimana sebuah perusahaan dapat mempertahankan keunggulannya dibanding kompetitor lain secara konsisten

dengan mengandalkan berbagai macam sumberdaya, seperti aset berwujud maupun aset tak berwujud, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, pengetahuan, kebudayaan, dan apa saja yang berada dibawah kontrol perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan strateginya dengan efisien dan efektif. Pandangan inilah yang dinilai relevan dalam mencerminkan keunggulan ekonomi berbasis pengetahuan (Marshall dalam Bontis, 2005). Salamudin, et.al (2010) menyatakan penekanan pada pentingnya nilai dan penyajian informasi aset tidak berwujud telah mengubah cara perusahaan dinilai. Pada akuntansi tradisional, perusahaan dinilai berdasarkan besarnya nilai aset berwujud. Namun, pada era ekonomi berbasis pengetahuan aset tak berwujud menjadi salah satu alat untuk menilai perusahaan dari pelaporan keuangan terkait dengan modal intelektual (*intellectual capital*). Macerinskiene dalam Utomo (2015) menyatakan ada tiga modal dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat mencapai tujuan, yaitu modal fisik (*physical capital*), modal keuangan (*financial capital*), dan modal intelektual (*intellectual capital*).

Modal intelektual (*intellectual capital*) dipandang memiliki peran yang penting dalam penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta nilai bagi perusahaan (Ariyudha, 2010). Modal intelektual adalah sumber daya tak terwujud di dalam sebuah perusahaan yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Fitriani, 2012). Modal intelektual menjadi topik yang penting karena isu-isu mengenai pengungkapan modal intelektual diyakini berperan penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai keunggulan. Bontis (Utomo, 2015) menyatakan modal intelektual sebagai segala sesuatu yang ada dalam perusahaan terkait sumberdaya tak berwujud, termasuk proses yang dilakukan perusahaan dalam mengolah sumber daya tersebut. Chen et.al (2005) menyatakan investor akan memberikan nilai yang tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah. Modal intelektual tidak dapat diukur secara akurat karena merupakan aset yang tidak berwujud. Tidak ada pedoman atau peraturan tentang pengukuran spesifik dan pelaporan mengenai modal intelektual (Bruggen et.al, 2009). Walaupun begitu, pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan oleh perusahaan tetap dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan pengguna laporan tahunan perusahaan akan informasi perusahaan yang lengkap dan rinci. Meningkatkan relevansi laporan keuangan tahunan oleh perusahaan dengan melakukan pengungkapan modal intelektual.

Pengungkapan sukarela (*voluntary*) di Indonesia tidak diharuskan oleh PSAK (PSAK No.1 revisi 1998) meskipun sangat bermanfaat. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi permintaan yang diwajibkan. Ariyudha (2010) menyatakan pengungkapan modal intelektual merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan *stakeholder*. Manajer diharapkan akan dapat mengungkapkan informasi modal intelektual untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih baik mengenai posisi keuangan perusahaan dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Tingkat pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan erat kaitannya dengan tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan perusahaan. Selain itu, keberadaan dewan direksi pun dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual (Ishak, 2018). Dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan monitoring yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat (Fitriani, 2012). Dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari atribut tata kelola perusahaan yang secara umum berperan penting dalam tatakelola perusahaan. Kepemilikan institusi dianggap turut serta dalam mempengaruhi pengungkapan modal intelektual (Ishak, 2018). Kepemilikan institusional

berarti kepemilikan saham oleh perusahaan lain yang dapat mengendalikan kinerja manajemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pentingnya penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual pada perusahaan publik di Indonesia menarik untuk dilakukan. Pertama, perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan terdaftar di BEI diwajibkan untuk mematuhi UU No. 40 tahun 2007 dan pengungkapan modal intelektual merupakan salah satu dari jenis informasi yang dibutuhkan pemakai untuk mengetahui kondisi perusahaan dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wiliam dalam Purnomisidhi, 2005). PSAK No. 19 (revisi 2012) menjelaskan bahwa aset tak berwujud merupakan aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun dalam regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan. Kedua, pengungkapan modal intelektual dapat mengurangi asimetri informasi dari tindakan manajer yang merugikan *stakeholder*. Pengungkapan informasi modal intelektual dapat memelihara hubungan dan kerjasama yang baik antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjaga kelangsungan operasional perusahaan di masa yang akan datang.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari penelitian Haji (2015) yang menguji pengaruh atribut komite audit yang meliputi ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah ahli keuangan dalam komite audit dan jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Haji (2015) memberikan penekanan yang spesifik terhadap efektivitas peran dari komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan performa organisasi yang berlaku di Negara yang ekonominya berkembang (Haji, 2015). Fungsi komite audit berperan untuk meyakinkan bahwa semua informasi yang relevan telah tersampaikan dengan baik kepada pihak luar perusahaan sehingga dapat membuat peningkatan mutu pada proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi (Rainsbury, et.al, 2008).

Penelitian ini mengembangkan penelitian penelitian sebelumnya (Haji, 2015). Penambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual mengacu dari penelitian Ishak (2018). Penambahan variabel meliputi ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan kepemilikan institusi yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Haji (2015). Pertimbangan utama adalah keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dan kepemilikan saham oleh institusi dapat meningkatkan proses pengawasan dan meningkatkan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan, khususnya terkait publikasi modal intelektual perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi variabel pengungkapan modal intelektual meliputi komite audit, dewan komisaris dan kepemilikan institusi.

Objek dalam penelitian adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan farmasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang saat ini sedang dihadapkan tantangan kompetisi global dan ketatnya kompetisi bisnis di sektor farmasi. Hal tersebut bermula dari rencana pemerintah yang akan meningkatkan penetrasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 100% bagi seluruh penduduk Indonesia pada 2019 mendatang (www.industry.co.id, 2018). Kebijakan tersebut dinilai akan mendorong peningkatan permintaan pasar terhadap obat generik tak bermerek. Pada program JKN, resep obat bagi peserta JKN didominasi obat generik tanpa merek dibandingkan dengan obat paten. Kondisi tersebut tidak menguntungkan Perusahaan Farmasi karena marjin obat generik relatif lebih rendah dibandingkan obat-obatan jenis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut mendorong setiap perusahaan, tidak terkecuali perusahaan farmasi untuk terus meningkatkan kinerja

perusahaannya dan inovasi-inovasi dalam memproduksi produk obat-obatan yang bermutu meski dengan harga yang lebih kompetitif agar dapat bersaing dan mempertahankan eksistensi perusahaan, dimana peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan modal intelektual yang dimiliki perusahaan.

Selain itu, pemilihan perusahaan farmasi didasarkan kepada pertimbangan bahwa perusahaan farmasi merupakan industri yang sangat memanfaatkan modal intelektual dalam kegiatan operasionalnya. Industri farmasi merupakan industri yang intensif melakukan inovasi dan seimbang dalam penggunaan sumber daya manusia serta teknologi sehingga pengungkapan modal intelektual menjadi suatu keharusan. Selain itu, perusahaan farmasi memiliki persaingan bisnis yang kuat, misalnya adanya berbagai obat generik, obat cina, obat luar yang beredar di masyarakat, mengharuskan perusahaan melakukan inovasi-inovasi demi menjaga stabilitas operasional perusahaan farmasi. Hal tersebut sangat bergantung pada eksistensi aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan yang memperkuat dilakukannya pengungkapan modal intelektual guna memenuhi kebutuhan *stakeholder* guna mengambil kebijakan perusahaan maupun investor potensial dalam rangka keputusan investasi.

## **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### ***Good Corporate Governance***

*Cadbury Committee* mendefinisikan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002).

Menurut FCGI, tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Good corporate governance* memiliki empat unsur penting, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Egon Zehnder (2000) dalam FCGI (2000) berpendapat bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*. Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh komite - komite. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris adalah komite kompensasi atau remunerasi, komite nominasi, dan komite audit. Dari beberapa komite tersebut, komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya, yaitu mengawasi manajemen secara menyeluruh.

### **Pengungkapan Modal Intelektual**

Ariyudha (2010) menyatakan pengungkapan modal intelektual merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan *stakeholder*. Manajer diharapkan akan dapat mengungkapkan informasi modal intelektual untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih baik mengenai posisi keuangan perusahaan dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Di Indonesia, pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan disajikan dalam laporan tahunan didukung regulasi, yaitu Bapepam Kep/134/BL/2006 yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan laporan tahunan. Akan tetapi, informasi mengenai item modal intelektual tidak diatur dalam regulasi

tersebut. Dengan demikian pengungkapan informasi modal intelektual bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary*) meskipun pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar walaupun tidak diharuskan oleh PSAK No.1 (revisi 1998). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi permintaan yang diwajibkan. Hal ini dilakukan agar pengguna laporan keuangan atau *stakeholders* dapat menyerap seluruh informasi keuangan maupun non-keuangan, aset berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki perusahaan.

Pengukuran pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini menggunakan *checklist* 61 komponen modal intelektual yang dikembangkan oleh Li et.al (2008). *Checklist* ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu, *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital*. Setiap *checklist* diberi skor secara manual dengan membaca laporan tahunan keseluruhan. Hal ini berarti bahwa setiap perusahaan dapat memiliki maksimal 183 poin (yaitu 61 item modal intelektual dikali 3 format penilaian).

**Tabel 1**  
**Item Pengukuran Modal Intelektual (ICDI)**

Modal SDM		Modal Relasional		Modal Struktural	
1	Jumlah karyawan	1	Pelanggan	1	<i>Intellectual property</i>
2	Usia karyawan	2	Keberadaan pasar	2	Proses
3	Perbedaan karyawan	3	Hubungan pelanggan	3	Filosofi manajemen
4	Persamaan karyawan	4	Akuisisi pelanggan	4	Budaya perusahaan
5	Hubungan karyawan	5	Retensi pelanggan	5	Fleksibilitas organisasi
6	Pendidikan karyawan	6	Pelatihan dan pembelajaran pelanggan	6	Struktur organisasi
7	Ketrampilan/ kecakapan/ keahlian	7	Keterlibatan pelanggan	7	Pembelajaran organisasi
8	Pekerjaan karyawan-kompetensi	8	Reputasi perusahaan	8	Penelitian dan pengembangan
9	Pekerjaan karyawan - pengetahuan	9	Penghargaan perusahaan	9	Inovasi
10	Etika karyawan/ kepribadian	10	<i>Public relation</i>	10	Teknologi
11	Komitmen karyawan	11	Persebaran dan jaringan	11	Perjanjian finansial
12	Motivasi karyawan	12	<i>Brands</i>	12	Fungsi pendukung pelanggan
13	Produktifitas karyawan	13	Saluran distribusi	13	Pengetahuan berdasar infrastruktur
14	Pelatihan karyawan	14	Hubungan dengan pemasok	14	Peningkatan dan manajemen kualitas
15	Kualifikasi karyawan	15	Kolaborasi bisnis	15	Akreditasi
16	Pengembangan karyawan	16	Perjanjian bisnis	16	Infrastruktur keseluruhan
17	Fleksibilitas karyawan	17	Kontrak favorit	17	<i>Networking</i>
18	Semangat karyawan	18	Kolaborasi penelitian	18	Jaringan distribusi
19	Kecakapan karyawan	19	Pemasaran		
20	Kerjasama karyawan	20	Hubungan pihak berkepentingan		
21	Keterlibatan karyawan	21	Kepemimpinan pasar		
22	Fitur karyawan lain				

Sumber: Li et.al (2008).

Selanjutnya skor pengungkapan modal intelektual untuk setiap perusahaan dihitung sebagai indeks dengan membagi jumlah item yang telah diungkapkan oleh perusahaan dengan jumlah total item yang diharapkan. Untuk setiap perusahaan, penelitian ini membagi empat

indeks pengungkapan, yaitu pengungkapan modal intelektual secara keseluruhan (ICDI), *human capital (HICDI)*, modal struktural (SICDI) dan pengungkapan modal relasional (RICDI). Berikut ini rumus indeks pengungkapan modal intelektual secara keseluruhan (ICDI):

$$ICDI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan modal intelektual capital}}$$

Sumber: Li et.al (2008).

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya mengenai kondisi perusahaan dan perusahaan telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan memahami masalah atau hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Keberadaan komite audit sangat berpengaruh terhadap perusahaan (Haji, 2015).

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Komite audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak (Abawayya, 2010). Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi. Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 juga menyatakan perusahaan *go-public* wajib untuk memiliki komite audit dengan jumlah minimal tiga orang, yaitu minimal satu orang komisaris independen yang juga berperan sebagai ketua komite audit, dan minimal dua orang pihak independen dari luar emiten. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen. Perusahaan dengan komite audit yang lebih besar cenderung mengungkapkan atau menyediakan banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian Ishak (2018), Wahyuni (2016) dan Haji (2015), menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis pertama (H1) sebagai berikut:

H1: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

### **Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Komite audit yang efektif dapat membuat peningkatan pada proses pelaporan sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholder* (Rainsbury, et.al., 2008). Sebagian besar anggota komite audit independen memastikan efektivitas pengambilan keputusan manajemen strategis. Komite audit harus terdiri proporsi yang lebih tinggi dari direktur non-eksekutif. Komite audit independen menyediakan pemantauan yang lebih baik dari manajemen dari keberadaan anggota eksekutif dengan keputusan yang obyektif. Kehadiran direktur non-eksekutif di komite audit mengurangi kemungkinan masalah keuangan. Oleh karena itu, kehadiran direktur independen melindungi kepentingan pemegang saham.

Komite audit independen melindungi reputasinya dengan memastikan kualitas tinggi dari laporan keuangan. Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam pelaporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena anggota yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak dalam menangani suatu permasalahan. Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Komite audit yang efektif sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholder* melalui pengungkapan modal intelektual (Rainsbury, et.al, 2008).

Pada penelitian dari Ishak (2018) dan Haji (2015) menyatakan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Temuan mengenai pengaruh independensi komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis kedua (H2) sebagai berikut:

H2: Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

### **Pengaruh Jumlah Ahli Keuangan dalam Komite Audit Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Tingkat pendidikan seorang komite audit diwajibkan mampu memberikan integritas yang tinggi dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya yang dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual dalam perusahaan. Tingkat pendidikan komite audit dirasakan berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual karena semakin tinggi jenjang pendidikan anggota komite audit maka semakin baik pola pikir dan tindakan yang diambil oleh anggota komite audit, khususnya dalam pengawasan dan memberikan penilaian yang handal atas laporan keuangan tahunan perusahaan.

*Financial literacy* komite atau keahlian keuangan komite audit terdiri dari anggota yang mampu membaca dan memahami laporan keuangan mendasar dan untuk mengevaluasi atau menganalisis informasi keuangan. Keahlian dalam audit, akuntansi dan pengendalian internal, merupakan faktor penting dari efektivitas komite audit. Anggota komite audit harus berpengetahuan dan berpengalaman baik untuk memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas komite audit. Kehadiran ahli keuangan membantu komite audit untuk memenuhi efisien mereka dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian internal, audit eksternal internal. Selain itu, pengalaman yang berbeda dari anggota komite audit membantu untuk mengevaluasi efektivitas komite Audit. Dengan demikian, komite audit dengan anggota yang pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola masalah keuangan bisa mengurangi perusahaan yang menghadapi *financial distress*. Dari perspektif audit internal, kehadiran ahli keuangan dari komite audit mengurangi kemungkinan kelemahan pengendalian internal. Ahli keuangan di komite audit dapat meningkatkan efektivitasnya, oleh karena itu untuk memenuhi tanggung jawab dalam pengawasan keuangan. Sesuai Peraturan No. IX.1.5 dikatakan bahwa setidaknya komite audit memiliki satu anggota yang mempunyai pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi. Jumlah ahli keuangan menunjukkan jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki pendidikan dengan latar belakang akuntansi atau keuangan dianggap profesional melaksanakan tugasnya.

Penelitian dari Ishak (2018) dan Haji (2015) menyatakan jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Temuan penelitian mengenai pengaruh jumlah ahli keuangan komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis ketiga (H3) sebagai berikut:

H3: Jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

### **Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Dalam menjalankan tugasnya, komite audit paling sedikit mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (*Corporate Governance Guidelines*, 2007). *Audit Committee Charter* (2005) memuat pernyataan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Pertemuan komite audit yang lebih sering akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur pengungkapan modal intelektual. Pertemuan komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Komite audit juga mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain

komisaris manajemen senior, kepala auditor internal, dan kepala auditor eksternal. Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit.

Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002). Komite audit melakukan pertemuan tiga sampai empat kali dalam setahun, yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit, sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina, 2000). Berdasarkan Peraturan No. IX.1.5 disebutkan bahwa pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit perusahaan dalam satu tahun periode sekurang-kurangnya berjumlah 3 kali pertemuan. Variabel jumlah pertemuan anggota komite audit dinyatakan dengan lambang MAC.

Beberapa penelitian terdahulu membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Ishak (2018), Indah (2017) dan Haji (2015) menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Temuan mengenai pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis keempat (H4) sebagai berikut:

H4: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan *monitoring* terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan *monitoring* yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat (Fitriani, 2012). Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Collier dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasihat manajemen (direksi).

Collier dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan *monitoring* yang dilakukan juga akan semakin efektif sehingga akan meminimalisasi *agency cost*. Pengendalian dan *monitoring* dewan komisaris dilakukan melalui komite-komite yang membantunya mengawasi secara langsung aktivitas perusahaan. Dikaitkan dengan pengungkapan mengenai nilai perusahaan (*intellectual capital-IC*), tekanan dewan komisaris yang berukuran besar terhadap manajemen akan semakin meningkat untuk mengungkapkan nilai perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Ishak (2018), Wahyuni (2016), menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Aini (2017), Temuan penelitian berkenaan dengan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis kelima (H5) sebagai berikut:

**H5: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.**

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk



bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam teori agensi dikemukakan bahwa asimetri informasi terjadi karena perilaku oportunistik pihak manajemen. Independensi dewan diperlukan untuk memantau dan mengontrol perilaku oportunistik dari manajemen. Mekanisme *corporate governance* dapat diperkuat dengan keberadaan dewan komisaris independen. Di Indonesia, setiap perusahaan tercatat wajib melaporkan jumlah dan data dewan komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh dewan (Kep305/BEJ/07-2004).

Independensi dewan komisaris yang diprosikan dengan proporsi komisaris independen yang meningkat maka fungsi kontrol akan semakin meningkat pula, sehingga membuat kontrol atas pengelolaan yang lebih efektif, dan menekan *agency cost* yang dikeluarkan oleh principal. Fama dan Jensen (1983) dalam Cerbioni dan Parbonetti (2007) menyatakan bahwa dewan yang mempunyai proporsi komisaris independen yang tinggi akan memiliki kontrol kuat atas keputusan manajerial, karena komisaris independen memiliki insentif untuk melakukan pengendalian atas keputusan mereka guna tetap mempertahankan citra yang baik bagi sumber modal dari luar perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian komisaris independen adalah meminta pengungkapan mengenai *intellectual capital* yang mencukupi dari pihak manajemen, sehingga perusahaan dapat tetap mempertahankan citranya di mata calon investor.

Penelitian terdahulu telah membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian Ishak (2018) menyatakan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Temuan riset berkenaan dengan pengaruh independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis keenam (H6) sebagai berikut:

**H6: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.**

### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Upaya yang dilakukan untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi rapat direksi dalam membahas masalah perusahaan. Frekuensi rapat direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota dewan berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan (Haji, 2015). Hal ini akan meningkatkan kapasitas pemantauan dan diharapkan meningkatkan pengungkapan informasi modal kapital. Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi (FCGI, 2002). Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen yang membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan.

Pertemuan dewan komisaris merupakan sarana komunikasi antar dewan komisaris maupun antara dewan komisaris dan manajer. Rapat dewan komisaris yang semakin sering dilakukan menandakan bahwa pengawasan terhadap manajemen tinggi, hal ini karena di dalam pertemuan dewan komisaris selalu membahas kinerja manajer selaku manajemen dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan manajemen yang tinggi ini diharapkan akan dapat mengurangi konflik agensi sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Rapat dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan dalam perusahaan

selama satu tahun. Informasi mengenai rapat dewan komisaris dapat dilihat pada *annual report* perusahaan dalam bagian laporan *corporate governance*. Xie et al. (2003) dalam Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin luas. Penelitian Ishak (2018) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Indah (2017) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual.

H7: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya (Sartika, 2015). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor yang berasal dari institusi dianggap mampu mejadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan (Aina, 2015). Institusi yang dimaksud adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya yang bentuknya seperti perusahaan, kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholder* pada akhir tahun (Sartika, 2015). Sedangkan yang dimaksud dengan *blockholder* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholder* dengan kepemilikan saham diatas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham dibawah 5%. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan, yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas di dalam perusahaan. Penelitian Ishak (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Temuan penelitian berkenaan dengan pengaruh kepemilikan institusi terhadap pengungkapan modal intelektual mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis kedelapan (H8) sebagai berikut:

**H8:Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian adalah Perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2017 sebanyak 11 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan kepada pertimbangan subjektif peneliti. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu (1) Perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, (2) Melakukan perdagangan saham aktif di BEI periode 2011-2017, dan (3) Memberikan laporan keuangan tahunan periode 2011-2017. Data sampel penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan farmasi yang telah diaudit dengan jumlah sebanyak 77 data laporan keuangan.

### **Operasional Variabel**

Variabel dependen (variabel Y) dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual, variabel independen (variabel X) meliputi ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan

komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan institusi, dan variabel kontrol adalah ukuran perusahaan.

**Tabel 3**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator	Skala
<p><b>Pengungkapan Modal Intelektual (ICDI)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Pengungkapan segala sesuatu yang dalam perusahaan terkait sumberdaya tak berwujud, termasuk proses yang dilakukan perusahaan dalam mengolah sumber daya (Bontis dalam Utomo, 2012).</p>	$\frac{\text{Jumlah item diungkapkan}}{\text{Total pengungkapan modal intelektual}}$ <p>Sumber: Li <i>et.al</i> (2008)</p>	Rasio
<p><b>Ukuran Komite Audit (SAC)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Jumlah anggota komite audit di perusahaan. Sesuai peraturan no IX.1.5 disebutkan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 anggota (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004)</p>	$\frac{\text{Jumlah anggota komite audit}}{3}$ <p>Sumber: Pike (2005)</p>	Rasio
<p><b>Independensi Komite Audit (ACINDP)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Jumlah anggota komite audit yang <i>independen</i> terhadap jumlah seluruh anggota komite audit                      Sumber: Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004</p>	$\frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite}} \times 100\%$	Rasio
<p><b>Jumlah ahli keuangan Komite Audit (FEAC)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Anggota yang mampu membaca dan memahami laporan keuangan mendasar untuk mengevaluasi atau menganalisis informasi keuangan (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004)</p>	$\frac{\text{Jumlah anggota komite audit ahli keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite}} \times 100\%$	Rasio
<p><b>Jumlah Rapat Komite Audit (MAC)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit perusahaan dalam satu tahun periode sekurang-kurangnya berjumlah 3 kali pertemuan (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004)</p>	$\frac{\text{Jumlah rapat komite audit}}{3}$	Rasio
<p><b>Ukuran Dewan Komisaris (UDK)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Thesarani, 2016)</p>	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Perusahaan	Rasio
<p><b>Independensi Dewan Komisaris (IDK)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Kep 305/BEJ/07-2004)</p>	$\frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$	Rasio
<p><b>Jumlah Rapat Dewan Komisaris (MDK)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Pertemuan atau rapat anggota dewan komisaris perusahaan (FCGI, 2000).</p>	$\frac{\text{Jumlah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Dalam Satu Tahun}}{\text{Saham institusional}}$ <p>Sumber: Waryanto (2010)</p>	Rasio
<p><b>Kepemilikan Institusi (KI)</b>  <b>Konsep variabel:</b> Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham beredar (Sartika, 2015).</p>	$\frac{\text{Total saham beredar}}{\text{Saham institusional}}$ <p>Sumber: Sartika (2015)</p>	Rasio

<b>Ukuran Perusahaan (SIZE)</b>	LN (Total Asset)	Rasio
<b>Konsep variabel:</b> Skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya total <i>asset</i> perusahaan (Damayanti dan Sudarma, 2007).		

Sumber: Data diolah.

### Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai koefisien regresi variabel dalam model penelitian, yakni pengungkapan modal intelektual (variabel Y), ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan institusi (variabel X) dan ukuran perusahaan (variabel kontrol), dimana nilai koefisien regresi variabel tersebut menjadi dasar disusunnya persamaan matematis model penelitian. Selain itu, analisis regresi linear juga digunakan untuk mengetahui nilai thitung dan nilai signifikansi dari setiap variabel penelitian sebagai dasar dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian. Persamaan matematis model regresi linear pada model 1 diuraikan sebagai berikut:

$$ICDI = \alpha + \beta_1 SAC + \beta_2 ACINDP + \beta_3 FEAC + \beta_4 MAC + \beta_5 UDK + \beta_6 IDK + \beta_7 MDK + \beta_8 KI + \beta_9 SIZE + e$$

Keterangan:

- ICDI : Pengungkapan modal intelektual
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_{1,2}$  : Koefisien regresi
- SAC : Ukuran komite audit
- ACINDP : Independensi komite audit
- FEAC : Jumlah ahli keuangan komite audit
- MAC : Jumlah rapat komite audit
- UDK : Ukuran Dewan Komisaris
- IDK : Independensi Dewan Komisaris
- MDK : Jumlah Rapat Dewan Komisaris
- KI : Kepemilikan Institusi
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- e : Standart error (5%)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif variabel dalam model penelitian disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengungkapan Modal Intelektual (Y)	77	2.04	4.56	3.0865	.54120
SAC	77	1.00	2.00	1.3988	.33467
ACINDP	77	33.33	66.67	51.1697	12.68067
FEAC	77	16.67	66.67	35.1730	16.13859
MAC	77	1.00	1.67	1.3365	.22077
UDK	77	6	12	8.66	1.759
IDK	77	33.33	66.67	48.5209	10.13466
MDK	77	3	6	4.09	.710
KI	77	10.17	54.06	19.9422	12.22092

SIZE	77	8.53	20.27	13.7594	2.80344
Valid N (listwise)	77				

Sumber: Output SPSS (2019).

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.049	.922		-2.221	.030
SAC	1.463	.319	.905	4.585	.000
ACINDP	.032	.009	.741	3.600	.001
FEAC	.008	.003	.250	2.501	.015
MAC	-.418	.221	-.171	-1.897	.062
UDK	.083	.040	.271	2.067	.043
IDK	.030	.007	.554	4.417	.000
MDK	-.245	.073	-.321	-3.333	.001
KI	-.010	.005	-.235	-2.126	.037
SIZE	.057	.022	.295	2.630	.011

a. Dependent Variable: Pengungkapan Modal Intelektual (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS (2019).

Berdasarkan tabel 5, maka persamaan regresi linear sederhana pada model 1 sebagai berikut :

$$\text{ICDI} = -2.049 + 1.463 \text{ SAC} + 0.032 \text{ ACINDP} + 0.008 \text{ FEAC} - 0.418 \text{ MAC} + 0.083 \text{ UDK} + 0.030 \text{ IDK} - 0.245 \text{ MDK} - 0.010 \text{ KI} + 0.057 \text{ SIZE} + 0.397 e$$

Untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen menggunakan uji koefisien determinasi (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase yang diketahui dari nilai *adjusted r square*. Hasil uji koefisien determinasi pada model 1 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6.**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 <sup>a</sup>	.525	.462	.39713

a. Predictors: (Constant), SIZE, SAC, MDK, IDK, MAC, FEAC, KI, UDK, ACINDP

Sumber: Hasil olah data SPSS (2019).

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai *adjusted r square* sebesar 0.462. hal ini menunjukkan bahwasanya variasi pada variabel pengungkapan modal intelektual dapat dijelaskan sebesar 46,2% oleh variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji t (uji parsial) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan pengaruh SAC (ukuran komite audit) sebesar positif 1,463 dan signifikan pada 0.000 (berada di bawah tingkat signifikansi 0.05). Dapat disimpulkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis pertama (H1) terbukti diterima.

Koefisien regresi variabel ACINDP (anggota komite audit independen) sebesar positif 0,032 dan signifikan pada 0.001 (berada di bawah 0.05). Hasil tersebut menunjukkan komite audit independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian maka hipotesis kedua diterima.

Koefisien regresi variabel FEAC (jumlah ahli keuangan komite audit) menunjukkan nilai positif 0,008 dan signifikan pada 0,015. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil pengujian tersebut berimplikasi bahwa hipotesis 3 diterima.

Koefisien regresi variabel MAC (jumlah rapat komite audit) menunjukkan nilai negatif 0,418 dan signifikan pada 0,062. Dapat disimpulkan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian maka hipotesis 4 ditolak.

Koefisien regresi variabel UDK (ukuran dewan komisaris) menunjukkan nilai positif 0,83 dan signifikan pada 0.043 (berada di bawah tingkat signifikansi 0.05). Hasil pengujian tersebut menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian maka hipotesis kelima diterima.

Koefisien regresi variabel IDK (independensi dewan komisaris) sebesar positif 0,030 dan signifikan pada 0.000 (berada di bawah tingkat signifikansi 0.05). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian maka hipotesis 6 diterima.

Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi variabel MDK (jumlah rapat dewan komisaris) sebesar negatif 0,245 dan signifikan pada 0,001. Dengan demikian maka dapat disimpulkan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Tanda negatif koefisien regresi tersebut berbeda dengan tanda yang diajukan dalam rumusan hipotesis, dengan demikian maka hipotesis 7 ditolak.

Koefisien regresi variabel KI (kepemilikan institusional) sebesar negatif 0,010 dan signifikan 0,037. Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Tanda koefisien regresi berbeda dengan tanda dalam rumusan hipotesis, dengan demikian maka hipotesis kedelapan 8 ditolak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Perusahaan yang memiliki jumlah ukuran komite audit yang lebih besar atau lebih banyak dapat menyebabkan peningkatan perusahaan untuk mengungkapkan atau menyediakan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan yang diantaranya berupa pengungkapan modal intelektual.

Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Perusahaan yang memiliki persentase komite audit independen yang lebih besar maka akan menyebabkan peningkatan kualitas dan kuantitas informasi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan yang diantaranya berupa pengungkapan modal intelektual.

Jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Anggota Komite audit yang memiliki pengetahuan atau

kemampuan mengelolah (memahami dan mempraktekan) tentang masalah keuangan, mencapai tanggung jawab secara efisien, mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan kehandalan data dan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan serta meningkatkan kuantitas informasi keuangan sebagai bagian dari item pengungkapan modal intelektual perusahaan.

Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada komite audit sebagai upaya mengoptimalkan pengungkapan modal intelektual perusahaan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Pengendalian dan monitoring dewan komisaris dilakukan melalui komite-komite yang membantunya mengawasi secara langsung aktivitas perusahaan. Dikaitkan dengan pengungkapan mengenai nilai perusahaan (*intellectual capital/IC*), tekanan dewan komisaris yang berukuran besar terhadap manajemen akan semakin meningkat untuk mengungkapkan nilai perusahaan melalui pengungkapan modal intelektual.

Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Dewan yang mempunyai proporsi komisaris independen yang tinggi akan memiliki kontrol kuat atas keputusan manajerial, karena komisaris independen memiliki insentif untuk melakukan pengendalian atas keputusan mereka guna tetap mempertahankan citra yang baik bagi sumber modal dari luar perusahaan yang dapat distimulasi melalui pengungkapan modal intelektual.

Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Adanya dominasi suara dari anggota Dewan Komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan atau kurang mengutamakan pengungkapan modal intelektual untuk bisa sebanyak mungkin diinformasikan dalam laporan tahunan perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Kepemilikan institusi yang lebih sedikit akan mengurangi kontribusi perusahaan terkait dalam pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, khususnya memperbanyak informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan modal intelektual.

Bagi investor yang memiliki minat berinvestasi saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI sebaiknya memperhatikan efektivitas komite audit dan dewan direksi sebagai pertimbangan utama, mengingat variabel tersebut telah terbukti secara empiris dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti perusahaan sektor lainnya seperti sektor perbankan, sektor properti dan sektor lainnya, sektor manufaktur karena pada perusahaan dalam sektor tersebut keberadaan pengungkapan modal intelektual yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, dapat melakukan penambahan variabel lain, seperti nilai perusahaan untuk mendapatkan hasil yang kompleks.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abawayya, S. and Guthrie, J. 2010. Intellectual capital and the capital market: a review and synthesis *Journal of Human Resource Costing & Accounting* Vol. 14 (3):196–226.
- Abeysekera, I. 2009. The influence of board size on intellectual capital disclosure by kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital* Vol.11 (4):504–518.
- Aini, S. 2017. Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan direksi terhadap pengungkapan intellectual capital. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Arifah, D. A. 2012. Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan intellectual capital pada perusahaan ic intensive. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 9 (2).

- Belkaoui, A. R. 2003. Intellectual capital and firm performance of US multinational firms. *Journal of Intellectual Capital* Vol. 4 (2): 215-226.
- Bontis, N. 2005. Intellectual capital: an explanatory study that develops measures and models. *Management Decision* Vol. 36 (2): 63-76.
- Brigham, E.F., and Houston, J.F. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bruggen, A., Vergauwen, P., and Dao, M. 2009. Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia. *Management Decision* Vol. 47 (2): 233-245.
- Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haji, A. A. 2015. The role of audit committee attributes in intellectual capital disclosure: evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal* Vol. 30 (8).
- Holland, J. 2006. Fund management, intellectual capital, intangibles and private disclosure. *Managerial Finance* Vol. 32 (4): 277-316.
- Indah, N. 2017. Pengaruh corporate governance terhadap intellectual capital disclosure, *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 6 (3).
- Ishak, Z. 2018. Monitoring mechanism and intellectual capital disclosure among bank in the GCC. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* Vol.22 (1).
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Li, J., Pike, R. and Haniffa, R. 2008. Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research* Vol. 38 (2): 137-159.
- Mahadewi, A. A. M. 2013. Pengaruh dewan komisaris dan komite audit pada pengungkapan modal intelektual perusahaan yang go public di BEI, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 2*.
- Nisfiannoor. 2010. *Desain Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurziah, F. 2014. Analisis pengaruh corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi terhadap intellectual capital disclosure. *Finance and Banking Journal* Vol.16 (2).
- Peraturan Bapepam-LK No. IX. 1.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Santoso, S. 2010. *Buku Latihan SPSS*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Sartika, D. 2015. Moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi* Vol. 4 (12).
- Sartono, A. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Research Design*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, H., and Putri, M. 2015. Pengaruh pengungkapan sukarela terhadap nilai perusahaan. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasi.
- Wahyuni, M.A. 2016. Pengaruh mekanisme corporate governance pada pengungkapan modal intelektual, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol. 21 (1).
- Xie, B., Davidson, W.N., and Dadalt, P.J. 2003. Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* Vol. 9 (3): 295-316.



